

**EKOWISATA DI AREA TAMBANG: TANTANGAN PENGEMBANGAN
KAWASAN EKOWISATA DI PESISIR LAUT DESA BATU BELUBANG
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

Kevin Sabri

Universitas Bangka Belitung

Email: sabrikevin961@gmail.com

Ibrahim

Universitas Bangka Belitung

Email: iim_babel@yahoo.com

Sarpin

Universitas Bangka Belitung

Email: sarpinfarras@gmail.com

Abstrak

Studi dalam penelitian ini membahas mengenai tantangan pengembangan kawasan ekowisata di pesisir laut Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah yang menjadi perhatian khusus oleh pemerintah dan masyarakat. Namun belum bisa menjadi kawasan ekowisata perikanan karena beberapa persoalan yang terjadi dalam proses pengembangannya. Hal ini berpengaruh pada kondisi lingkungan yang disebabkan oleh tambang laut di wilayah pesisir laut Desa Batu Belubang menjadi rusak akibat penambangan timah laut seperti TI apung dan kapal hisap milik PT. Timah. Pertambangan ini tidak hanya dilakukan di daratan saja, melainkan juga dilakukan di perairan, baik itu sungai maupun laut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi desain pengembangan ekowisata di area tambang pesisir laut Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah dan untuk mendeskripsikan tantangan dalam pengembangan ekowisata di pesisir laut Desa Batu Belubang tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Gerakan sosial baru oleh Rajendra Singh dan teori ekologi politik dari Paul Robbins. Adapun metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan yang terjadi dalam pengelolaan ekowisata dapat memunculkan berbagai persoalan unik, di satu sisi ditemukan masyarakat menjadi perusak lingkungan akibat Ti apung yang dilakukan masyarakat dengan cara pengambilan timah di laut. Justru di sisi lain masyarakat berlomba-lomba untuk pengelolaan ekowisata laut di sepanjang pesisir laut desa batu belubang tersebut. namun aktivitas pertambangan yang dilakukan, khususnya oleh ponton isap produksi (PIP) merupakan aktivitas yang jelas memiliki izinnya karena bermitra dengan PT. Timah selaku pemilik IUP, sedangkan pengelolaan ekowisata dalam hal ini ekowisata pesisir laut desa batu belubang juga memiliki izinnya, hal ini terdapat perbedaan di dalam masyarakat terkait adanya aktivitas pertambangan di kawasan ekowisata pesisir laut desa batu belubang. Dari kedua aktivitas ekowisata dan pertambangan ini justru harus melibatkan masyarakat dan pemerintah untuk pengambilan keputusan dalam memilih pengembangan potensi daerah pesisir laut desa batu belubang dengan secara tegas. Sehingga memunculkan perbaikan-perbaikan lingkungan untuk kedepannya agar lingkungan wilayah pesisir laut desa batu belubang bisa menunjukkan potensi ekologi yang baik dan memberikan contoh terhadap wilayah lain dalam menunjukkan lingkungan yang konsisten dalam pengelolaannya.

Kata Kunci: Ekowisata, Tambang, Ekologi politik, Pengambilan keputusan

Abstract

This study discusses the challenges of developing an ecotourism area on the sea coast of Batu Belubang Village, Central Bangka Regency, which is of particular concern to the government and the society. However, it cannot become a fishery ecotourism area due to several problems that occur in the development process. It causes environmental damage caused by marine mining in the coastal area of Batu Belubang Village such as Inconvensional floating mines and suction boats belonging to PT. Timah. This mining is not only carried out on land, but also in waters such as rivers and seas. This study aimed to identify ecotourism development designs in the seacoast mine area of Batu Belubang Village, Central Bangka Regency and describe the challenges in developing ecotourism in the seacoast of the village. The theories used in this study were the theory of new social movements by Rajendra Singh and the theory of political ecology by Paul Robbins. The method used was descriptive qualitative, while the data collection techniques were interviews, observation and documentation. The results of this study indicated that the challenges that occur in ecotourism management can bring up various unique problems. However, it was also found that the community has become an environmental destroyer due to unconventional floating mining carried out by the community by taking tin at sea. On the other hand the community was competing for the management of marine ecotourism along the seacoast of the Batu Belubang Village. However, mining activities carried out, especially by production suction pontoons, were activities that clearly have permits because they partnered with PT. Timah. There were differences in the community related to mining activities in the seacoast ecotourism area of Batu Belubang Village. From the two activities, it was necessary to involve the community and government in making decisions for choosing the development of the potential for the seacoast area of Batu Belubang Village in a firm manner so that it can bring environmental improvements in the future. Therefore, the environment for the seacoast area of Batu Belubang Village can show ecological potential which is good and provides an example to other regions in showing a consistent environment in its management.

Key words: Ecotourism, Mine, political ecology, Decision-making

PENDAHULUAN

Keberagaman Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu daerah penghasil timah terbesar di Indonesia, serta daerah kepulauan dengan gugusan pulau dan pesisir laut yang memesona menjadi daya tarik yang luar biasa di daerah kepulauan ini. Sehingga, apapun hal-hal yang berkaitan dengan potensi kekayaan alamnya berupa timah dan pariwisata dapat menjadi acuan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat di dalamnya. Karna Potensi dan pengelolaan pesisir dapat diambil sebagai jasa lingkungan, pemanfaatan jasa lingkungan diantaranya melalui ekowisata pesisir dengan berbagai tujuannya (Mukti Ali, 2021). Upaya untuk menindaklanjuti RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, RIPPDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2025 juga telah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan lingkungan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan. Selama ini sangat identik dan dikenal sebagai pulau penghasil timah. Sebagai wilayah dengan sektor ekonomi utama pertambangan, permasalahan lingkungan menjadi isu utama yang selalu dihadapi oleh Kepulauan Bangka Belitung.

Kemunculan pertambangan timah awalnya hanya dilakukan di daratan di wilayah Bangka Belitung. Menurut Rustian Al Ansori, (2016), mengatakan Pertambangan telah menjadi ancaman bagi sektor pariwisata di Bangka Belitung. Kenyataan itu tidak dapat dipungkiri, Beberapa waktu trakhir ini, kegiatan penambangan telah merambah ke wilayah pariwisata. Masyarakat bereaksi, Pemerintah daerah juga turut peduli untuk menyelamatkan alam wisata, namun setelah maraknya kegiatan penambangan, adanya regulasi kegiatan penambangan rakyat imbasnya yang lebih dahulu luluh-latak yakni pesisir laut batu belubang-Bangka tengah. Penambangan timah di pesisir laut telah merusak semuanya sehingga usaha pariwisata pun terganggu dan para pengusaha pariwisata pun berteriak karena adanya kegiatan penambangan didekat kawasan wisata pesisir laut desa batu belubang-bangka tengah yang dikembangkan.

World Tourism Organization menyatakan bahwa seiring dengan waktu, pariwisata telah menjadi suatu penggerak kunci bagi kemajuan sosial ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan usaha, pembangunan infrastruktur dan perolehan pendapatan. Diperkirakan di dunia kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sekitar 5% dan lebih dari 10% bagi negara-negara di mana pariwisata merupakan pilar ekonomi yang penting, dan bahkan lebih besar lagi bagi negara-negara pulau kecil dan negara berkembang di mana pariwisata adalah sektor ekonomi. Selama sepuluh dekade

terakhir, pariwisata terus tumbuh dan menjadi salah satu sektor pendapatan daerah yang paling besar dan paling cepat tumbuh di Indonesia. Kecenderungan jangka panjang kedatangan wisatawan internasional adalah terus bertumbuh, mencapai 922 juta pada tahun 2008 (meningkat dari 684 juta pada tahun 2000 dan 904 juta pada tahun 2007), dan diperkirakan mencapai 1,6 milyar pada tahun 2020. Meskipun akhir-akhir ini pariwisata dipengaruhi oleh kegiatan tambang di pesisir laut.

Menurut Ibrahim, dkk, (2019), menyebutkan bahwa pertambangan timah di beberapa daerah yang ada di Babel telah menunjukkan implikasinya kepada perubahan karakteristik masyarakat yang sebelumnya memiliki integrasi yang sangat kuat, kemudian menjadi tersegmentasi ke dalam dua kelompok kepentingan. Yakni yang pro pertambangan dan kontra terhadapnya, namun Perubahan *landscape* Bangka pun semakin terlihat dengan penambangan-penambangan timah yang menjadi-jadi, tidak terkendali, hanya mementingkan keuntungan semata, serta tidak melakukan reklamasi dalam upaya perbaikan lahan pasca tambang laut. Untuk lahan pertambangan juga sudah mulai beralih ke tempat-tempat bersejarah, daerah pemukiman, lahan pertanian dan perkebunan, hutan lindung, jalur hijau, hingga ke kawasan wisata pesisir laut yang tentunya berkaitan dengan kelautan (Erman, 2010).

Ekowisata merupakan salah satu fenomena sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi, sehingga butuh perhatian yang besar dari para ahli perencanaan pembangunan. Sedangkan pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk juga perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha komersil yang terkait dengan bidang tersebut (Bahiyah et al., 2018). Fenomena yang ada pada sektor pariwisata diharapkan memberikan manfaat pada masyarakat maupun lingkungannya. Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, yakni secara ekonomi, sosial dan budaya (Bahiyah et al, 2018).

Kondisi ini membuat kegiatan pariwisata tidak kondusif. Karena usaha pariwisata semakin terancam di berbagai Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Masing-masing usaha pariwisata telah menjadi kompetitor antara mereka untuk dapat membuat usahanya dapat meraih keuntungan dan divisa bagi negara, namun di Bangka Belitung sebaliknya, usaha pariwisata sedang berjuang untuk menyelamatkan pariwisata dari dampak negatif kegiatan penambangan, menuju apa yang terjadi saat ini di Bangka Belitung terhadap usaha pariwisata tak cukup kuat dilindungi regulasi yang ada, namun demikian dikalahkan regulasi bidang pertambangan. (Rustian Al Ansori, 2016).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang dengan gambling sebagai regulasi untuk melindungi kegiatan pariwisata sepertinya terabaikan. Sedangkan kegiatan penambangan selalu lebih unggul dengan regulasi pertambangannya. Kegiatan penambangan yang mengganggu obyek wisata, selalu terhenti bukan karena memang obyek wisata tersebut dilindungi Undang-Undang namun karena desakan masyarakat sekitarnya diantaranya nelayan yang merasa dirugikan karena kegiatan penambangan di pesisir laut mengakibatkan berkurangnya hasil tangkapan. (Rustian Al Ansori, 2016), Seperti juga yang terjadi terhadap wilayah pesisir laut desa batu belubang Kabupaten Bangka Tengah. Kegiatan penambangan dengan menggunakan kapal isap juga mengancam rusaknya pesisir laut Desa Batu Belubang.

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang dikembangkan. Pasca timah diharapkan desa batu belubang Kabupaten Bangka Tengah sebagai gerbang pariwisata berskala Internasional. Pulau Bangka selain terkenal akan tambang timah juga memiliki keindahan alam seperti pesisir pantai dan laut yang tak kalah menariknya. Akan tetapi karena aktivitas tambang, maka sektor pariwisata berjalan sangat lamban, padahal potensi pariwisata diharapkan menjadi salah satu sektor yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat perubahan lingkungan pertambangan menjadi lahan ekowisata untuk meningkatkan proses penganti dari pada pertambangan (Ferdiana, 2020).

Proses penyebab tantangan dalam pengembangan ekowisata di area tambang. Eksploitasi tambang indentik dengan kerusakan lingkungan. Meski tata kelola tambang modern telah dikembangkan. Tetapi tetap saja potensi kerusakan lingkungan masih ada pasca tambang. Kerusakan lingkungan mengancam potensi ekowisata di suatu daerah. Tambang dan ekowisata jelas dua bidang yang berbeda. Sulit bagi suatu daerah menjaga lingkungan tetap asri untuk mengembangkan potensi ekowisata. Jika daerah tersebut dieksploitasi perusahaan tambang. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kedua sektor ini cukup menggiurkan (Rudy anarta dkk, 2019). Hal inilah yang membuat berbagai tantangan dalam pengembangan ekowisata yang terjadi di masyarakat. Begitu pula yang terjadi di wilayah pesisir laut Desa Batu Belubang ini.

Desa Batu Belubang Bangka Tengah menjadi salah satu daerah terpinggir pulau Bangka yang harus menjadi perhatian khusus karena pembangunan yang kurang, padahal potensi ekowisata yang sangat menunjang tinggi di desa tersbeut. Dengan persoalan tambang maka hal ini banyak pilihan-pilihan yang harus dipilih yang kemudian menjadi salah satu alternatif untuk perbaikan lingkungan yang diakibatkan oleh tambang.

Kemudian hal ini seakan menjadi praktek yang terus terjadi dan kerap terjadi di kalangan masyarakat desa batu belubang, karena sangat relevan dengan melihat kondisi yang ada di daerah batu belubang dimana konsep desentralisasi tidak berjalan relevan dikarenakan masyarakat di batu belubang kurang mendapatkan perhatian oleh pemerintah padahal letak wilayah ini sangat strategis di wilayah pesisir laut yang dominan masyarakatnya berpenghasilan dari laut. Sedangkan laut menjadi rusak dikarenakan tambang laut yang begitu dahsyat. Hal ini lah yang harus di pikirkan dalam memilih sektor pendapatan selain pertambangan, pariwisata ikut serta di dalamnya (Kevin sabri, 2019)

Penjelasan yang telah diuraikan di atas dan adanya kasus yang terjadi di masyarakat mengenai fenomena aktivitas pertambangan laut yang dilakukan tentu saja lambat laun juga akan merusak tempat wisata berbasis pesisir laut yang ada di wilayah desa batu belubang. Menurut data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau yang di singkat (WALHI) perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, menyebutkan tidak kurang dari 5.270 hektar terumbu karang rusak akibat tambang laut. Bahkan diperkirakan sekitar 400 hektar ekosistem mangrove ikut rusak (Ismi, 2020). Inilah yang kemudian menjadi hal yang menarik bagi peneliti untuk ditelusuri lebih jauh lagi. Maka dilakukan penelitian dan analisa skripsi yang berjudul “Ekowisata di Area Tambang: Tantangan Pengembangan Kawasan Ekowisata di Pesisir Laut Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah”, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian (Karlina, 2015). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang berkaitan dengan penyajian data secara kualitas, bukan secara angka-angka, dan biasanya lebih kepada eksplorasi data (Rahman dan Ibrahim, 2009: 41). Pada penelitian yang dilakukan, jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah wawancara, dimana peneliti memperoleh data melalui wawancara secara langsung kepada narasumber yang dituju.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbentuk deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena atau peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan,

persepsi, pemikiran orang lain secara individual maupun secara berkelompok (Sukmadina dalam Rahman dan Ibrahim, 2009:44).

Jenis Penelitian

Jenis data pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yakni penelitian yang menyajikan datanya bukan secara angka-angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:

1) Data Primer

Data primer sendiri merupakan data utama, seperti responden langsung, objek yang diamati secara langsung, buku utama yang dijadikan referensi, dan lainnya sebagai sumber data utama (Rahman dan Ibrahim, 2009:42). Informan yang sudah ditentukan oleh peneliti memberikan data seputar topik penelitian melalui wawancara mendalam dan tidak terstruktur. Objek penelitian yang diteliti secara langsung adalah kegiatan di lokasi penelitian yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Data dari wawancara secara langsung dan observasi lapangan inilah yang kemudian dapat dijadikan sebagai data primer penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang atau sebagai sumber referensi tambahan yang dapat dijadikan sebagai sumber tambahan dalam suatu penelitian (Rahman dan Ibrahim, 2009:42). Buku yang digunakan dalam penelitian ini yakni buku terkait metodologi penelitian kualitatif, karena sesuai dengan desain penelitian yang digunakan oleh peneliti. Peneliti juga menggunakan Arba (2017) yang memuat berbagai bahasan mengenai ekologi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang erat kaitannya dengan objek yang diteliti. Selain itu juga ada peraturan Undang-Undang yang digunakan peneliti sebagai dasar peraturan yang ditetapkan mengenai dampak tambang terhadap sektor lain.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah pesisir laut Desa Batu Belubang, kabupaten Bangka tengah, Alasan penelitian memilih lokasi ini karena di kawasan pesisir laut ini sedang dilakukan pengelolaan kawasan pariwisata oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan masyarakat sekitar, bersama dengan adanya persoalan keberadaan tambang laut atau yang disebut sebagai TI apung di area tak jauh dari bibir pantai yang

disebut sebagai pesisir serta berbagai persoalan kapal isap milik perusahaan yang bertambang di laut tersebut. Sehingga ekowisata di area tambang atas diskursus kontruksi fenomena tersebut yang ada semakin jelas terlihat antara pariwisata dan persoalan pertambangan di daerah ini. Kemudian waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak surat turun lapangan disahkan oleh dosen pembimbing untuk pengambilan kebutuhan data skripsi dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, 1 (satu) bulan pengumpulan data dan 2 (dua) bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk analisis lapangan dan wawancara terhadap berbagai setekholder.

Target/Subjek Penelitian

Menurut Idrus (2009:91), subjek penelitian mencakup individu, benda, atau organisme yang dibutuhkan sebagai sumber informasi dalam pengumpulan data penelitian. Pada penelitian ini, subyek penelitiannya adalah masyarakat dan pemerintah daerah serta lembaga organisasi desa terkait diskursus kontruksi terkait kerusakan lingkungan terhadap pertumbuhan/pengelolaan wisata kabupaten Bangka tengah serta lembaga-lembaga lain yang erat kaitannya dengan pengambilan keputusan ekowisata antar tambang di wilayah pesisir laut desa batu belubang. Teknik pengumpulan informan yang digunakan peneliti adalah *purposive sampling*, yaitu teknik sampling dengan pengambilan sampel dengan adanya pertimbangan tertentu untuk dijadikan sumber data (Sugiyono, 2007). Pertimbangan peneliti dalam menentukan informan adalah:

1. Peran suatu lembaga dalam diskursus kontruksi pengambilan keputusan wilayah yang ada di kabupaten Bangka tengah, selain itu, peneliti juga mempertimbangkan peran narasumber dalam pengambilan keputusan dan hirarki kekuasaan terhadap ekowisata di wilayah pesisir desa batu belubang kabupaten Bangka tengah.
2. Peneliti mengambil informasi dari koordinator masyarakat yang ikut terlibat di dalam kerusakan lingkungan di wilayah pesisir laut desa batu belubang kabupaten Bangka tengah untuk memperoleh data yang lebih akurat.
3. Peneliti juga mengambil informasi dari orang di dalam suatu lembaga yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud. Di sektor pariwisata peneliti mengambil informasi dari kelompok atau pengurus pariwisata.
4. Peneliti juga mengambil informasi dari lembaga dan orang-orang yang berkecimpung di bidang pertambangan, baik itu orang yang terlibat secara langsung di lokasi kejadian, ataupun orang yang masih berhubungan dengan pertambangan di wilayah penelitian.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memiliki tujuan utama yakni untuk mendapatkan data. Dan tanpa teknik pengumpulan data suatu penelitian tidak bisa mendapatkan data yang memenuhi standard data yang ditetapkan (Hardani, dkk, 2020). Agar diperoleh data yang akurat dan relevan dengan penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan Tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan maksud dan tujuan tertentu (Hardani, 2020). Percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai, serta pihak yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara (Hardani, 2020). Terdapat beberapa jenis dalam wawancara, seperti wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, wawancara secara kelompok, wawancara bergender, wawancara berbingkai, dan wawancara interpreting (Idrus, 2009:107-109). Teknik wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni jenis wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang hendak diajukan, namun tidak terlalu fokus pada urutan atau daftar pertanyaan, sehingga pertanyaan masih bisa dikembangkan. Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya. jenis wawancara tidak terstruktur ini menjadi teknik pengumpulan data utama karena relevan dengan jenis penelitian kualitatif yang digunakan, yakni wawancara secara terpusat.

2. Observasi

Usman dan Purnomo dalam Hardani (2020), menyebutkan observasi merupakan pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Selain itu juga, terdapat dua indera yang sangat vital dalam melakukan pengamatan, yakni mata dan telinga (Hardani, 2020: 123). Oleh sebab itu, kedua indera tersebut haruslah benar-benar baik dalam melakukan pengamatan. Terdapat 3 jenis teknis observasi, yakni observasi partisipasi, observasi sistematis, dan observasi eksperimental (Hardani, 2020: 129-132). Pada penelitian yang dilakukan ini. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi, yaitu peranan peneliti sebagai pengamat terlibat secara langsung dalam penelitian yang diobservasi. Peneliti melakukan observasi terhadap lokasi penelitian yakni di seputaran wilayah pesisir laut desa batu belubang dan sekitarnya untuk melihat secara langsung bagaimana situasi pariwisata dan pertambangan yang terjadi di wilayah

tersebut. Sehingga sulit sekali untuk mengambil keputusan sebagai pertumbuhan ekowisata yang saat ini menjadi dilema.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan cara mencatat data-data yang sudah ada sebelumnya (Hardani, 2020:149). Pengambilan datanya bisa diperoleh dari dokumen-dokumen. Dokumen yang dimaksud bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya lainnya (Hardani, 2020: 150). Dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang sumber datanya berasal dari dokumen-dokumen, baik itu dokumen peraturan, arsip, grafik, peta lokasi, foto-foto, dan sebagainya (Rahman dan Ibrahim, 2009: 43). Dokumentasi yang digunakan peneliti yakni berupa foto-foto aktivitas yang terjadi di lokasi penelitian, baik itu terkait pariwisata yang ada maupun kerusakan lingkungan terhadap pertambangan dan atau sedang dilakukan. Dokumentasi lainnya terkait diskursus kontruksi dalam pengelolaan lingkungan juga bisa dijadikan sebagai salah satu data dalam penelitian yang dilakukan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian yang dilakukan menggunakan teknik analisis data oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*). Dan penarikan simpulan atau verifikasi (Hardani, 2020: 160-174). Berikut penjelasan mengenai 3 alur kegiatan dari model intraktif Miles dan Huberman:

1. Reduksi data

Patilima dalam Hardani (2020). menjelaskan Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan yang ditemukan dilapangan. Pada tahap ini, peneliti melakukan kode terhadap data dan membuang beberapa data yang kurang relevan dengan penelitian. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai macam cara melalui seleksi, misalnya melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya (Hardani, 2020). Proses reduksi data bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga lebih mudah untuk dilakukan kesimpulan pada tahap verifikasi setelah penelitian berlangsung.

2. Penyajian data (*data display*)

Setelah melakukan reduksi data, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah penyajian data. Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman yakni “*sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan*” (Hardani, 2020;167). Artinya, pada tahap ini data telah disusun untuk mempermudah peneliti melakukan tahap analisis selanjutnya, yaitu penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Simpulan atau Verifikasi

Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data merupakan tahap terakhir yang dilakukan dalam menganalisis data milik Miles dan Huberman. Simpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya (Hardani, 2020: 171). Peneliti dapat mempertahankan serta menjamin validitas dan realibilitas data hasil temuan dengan melakukan verifikasi data agar bisa dipertanggung jawabkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desain Pengembangan Ekowisata di Area Tambang Pesisir Laut Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah

Kondisi alam dan kultur kebudayaan Desa Batu Belubang menjadi sebuah sebab utama dalam pengembangan kawasan ekowisata di Desa Batu Belubang, ditunjang dengan peningkatan ekowisata pesisir laut yang cukup signifikan membuat wilayah pesisir laut Desa Batu belubang menemukan formulasi-formulasi baru dalam menjaga alam dan mengembangkan ekowisata serta potensi yang ada. Kegiatan ekowisata pesisir laut telah menjadi primadona bagi daerah saat ini, daerah-daerah yang ada di kawasan pesisir laut berlomba-lomba berusaha untuk mengembangkan ekowisata pesisir laut menjadi komoditi utama dalam bisnis pariwisata. Wawancara yang dilakukan peneliti kepada ketua umum Masyarakat penggerak Sadar wisata (Pokdarwis) Kabupaten Bangka Tengah di Desa Batu Belubang, Nano Krisno (54 Tahun) menyebutkan: “*Ekowisata pesisir laut Desa Batu Belubang ini mulai di kembangkan sejak 2014, 2015 di resmikan oleh bapak Erzaldi Rosman waktu itu masih menjabat sebagai bupati Bangka Tengah. Pada saat itu pengembangan ekowisata belum cukup memadai karena berbagai fasilitas masih kurang dan masyarakat sekitar juga belum paham cara pengembangan ekowisata di sini namun seiringnya waktu beberapa masyarakat ikut terlibat dalam berbagai pengembangan ekowisata*” (Wawancara 30 Mei 2022).

Sejalan dengan perkembangan ekowisata di area tambang yang diketahui memiliki garis pesisir laut dan terletak bersebelahan ini disuguhkan dengan pemandangan Kapal Isap Produksi (KIP) dan TI Ponton yang memproduksi tak jauh dari bibir pantai. Hal ini tentu saja berdampak pada kawasan pengembangan ekowisata untuk kedepannya karena adanya aktivitas pertambangan tersebut. Pemanfaatan pengembangan ekowisata pesisir laut Desa Batu Belubang dapat memberikan dampak yang berbeda baik terhadap sumber daya alam maupun bagi masyarakat. Salah satu pemanfaatan kawasan ekowisata pesisir laut adalah untuk kegiatan pengembangan ekowisata. Kegiatan ekowisata memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan pendapatan baik masyarakat maupun pemerintah daerah setempat apabila pengelolaanya dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Menjamin keberlanjutan dari sumber daya yang terdapat di wilayah pesisir, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta memberikan manfaat yang besar kepada semua pihak terutama masyarakat pesisir. Hal senada juga diutarakan pada wawancara peneliti dengan Bupati Kabupaten Bangka Tengah, Algafry Rahman yang menyebutkan: *“kalo pemerintah melihat bahwa Desain atau konsep dalam pengembangan ekowisata pesisir dan laut haruslah terencana dan terpadu yang mampu memberikan kebermanfaat kepada masyarakat pesisir terkhusus masyarakat desa batu belubang karna wilayah pesisir sebagai wilayah perahlian antara ekosistem darat dan laut yang saling berintraksi”* (Wawancara, 26 Juni 2022)

Pernyataan tersebut menguatkan bahwa desain dalam pengembangan ekowisata harus terencana dengan teratur. Namun Saat ini terdapat Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan kebijakan-kebijakan daerah yang diatur dalam peraturan daerah. Dasar pemikiran dibuatnya Undang-undang ini adalah terdapat kecenderungan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas orang dalam pemanfaatan sumber dayanya atau akibat bencana alam. Hal tersebut juga diperkuat pada wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Firmansyah yang menyebutkan: *“desain dalam pengembangan ekowisata di wilayah pesisir dan laut jelas kita harus berpatokan dengan Undang-undang yang telah di tetapkan oleh pemerintah kita, karna wilayah pesisir dan laut rentan mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia itu sendiri.*

Mengapa demikian karna sulit juga kita menyiapkan desain pengembangan ekowisata sebaik mungkin namun di sisi lain alam kita rusak, kan sama saja bebulak. Makanya muncullah undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Agar dalam pengembangan ekowisata dapat terencana dan terpadu”(wawancara, 2 Juli 2022)

Pengembangan ekowisata di area tambang pesisir laut Desa Batu Belubang dapat memunculkan beberapa desain konsep pengembangan ekowisata di pesisir laut Desa Batu Belubang yang dapat di lakukan oleh seluruh stakeholders terkait, yaitu:

Contohnya adalah Desain Ramah Lingkungan, yang di rancang untuk pengembangan ekowisata di wilayah pesisir laut Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah. Mulai dari sampah plastik hingga aktivitas tambang laut yang terjadi dilautan pesisir, menjadi ancaman rusaknya lingkungan pesisir laut. Untuk itu, *Thomas Bell dari Partnerships in Environmental Management for the seas of East Asia (PEMSEA)* menyebut perlunya pemahaman dan manajemen kesadaran lingkungan yang berkelanjutan di beberapa negara (daerah) yang memiliki kawasan laut lewat ekonomi biru (*blue economy*). Sehingga, lingkungan laut tetap terjaga sambil beriringan dengan perkembangan ekonomi. tentunya ini (ekonomi biru), karena konsepnya relatif baru dan masih dalam pengembangannya. Setidaknya ada beberapa yang dapat difokuskan untuk penerapan ramah lingkungan ini, yakni ekoturisme, perikanan, pencegahan zat-zat bahaya, hingga manajemen penggunaan lahan. Selaras dengan wawancara peneliti dengan sekretaris dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Bangka Tengah, Imam Suhadi (42 tahun) menyebutkan bahwa: *“ramah lingkungan ini kan menjadi faktor penting dalam pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Sehingga ramah lingkungan ini terdapat beberapa manfaat yang diberikan, bila mana kita mampu untuk menjaga dan mengelola nya. Manfaat itu tanpa kita sadari yakni menyadari kita agar lebih menjaga kawasan ekowisata yang berkelanjutan, kan kira-kira macam tu”*(wawancara, 7 Juni 2022)

Penjelasan-penjelasan di atas dapat dilihat bahwa sudah banyak aksi-aksi yang menentukan desain pengembangan ekowisata di wilayah pesisir laut Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah. Pengembangan-pengembangan tersebut rutin dilakukan dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pembangunan ekowisata tersebut seharusnya dilakukan sesuai dengan desain-desain yang direncanakan, terutama dalam pengambilan keputusan untuk sektor ekowisata yang dilakukan selama perkembangan. Apabila tidak ada desain

konsep pengembangan dan pembangunan, maka dapat mengancam kawasan tersebut dalam waktu yang cukup lama, Sehingga sulit untuk diperbaiki.

Pengembangan ekowisata di area tambang tentu memiliki desain konsep yang harus di jalankan. Pernyataan tersebut menguatkan bahwa masyarakat dan pemerintah butuh waktu untuk merancang desain konsep ekowisata di Desa Batu Belubang. Adapun desain pola yang tergambarkan dari proses desain pengembangan ekowisata pesisir dan laut adalah sebagai berikut:

Desain Pengembangan Ekowisata di Wilayah Pesisir Laut Desa Batu Belubang			
Bentuk Alam	Budaya Wisata	Bentuk Nyata Ekowisata	<u>Stakeholders</u>
Desa Ekowisata	1. Ekowisata Perikanan	Merupakan suatu bentuk perjalanan wisata yang bertanggung jawab ke kawasan alam yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat.	1. Pemerintah Daerah
	2. Ekowisata (Ecotourism)		2. Pokdarwis (masyarakat sadar wisata)
	3. Desa Ekowisata (sejarah budaya)		3. Kades dan lain sebagainya
	(Wawancara, 30 Mei-10 Juni 2022)		

Gambar 2. Skema Desain Pengembangan Ekowisata

Sumber: Observasi dan Wawancara Peneliti (2022)

Gambar di atas adalah skema desain pengembangan ekowisata di wilayah pesisir dan laut Desa Batu Belubang yang dilakukan oleh berbagai *stakeholders* yang terkait. Tiap tahapan memiliki karakteristik dan aktor yang terlibat. Proses tersebut dianalisis dengan menggunakan teori gerakan sosial baru (GSB) oleh Rajendra Singh dan dipadukan dengan teori ekologi politik dari Paul Robbins. Dibagi menjadi satu tahapan dari masing-masing teori.

Tantangan Dalam Pengembangan Ekowisata di Pesisir Laut Desa Batu Belubang

Tantangan pembangunan ekowisata dan industrialisasi wilayah pesisir dan lautan membawa dampak terhadap penduduk, dukungan sumber daya dan masalah utama adalah penduduk yang dihadapkan dengan perkembangan lingkungan industri, kondisi masyarakat pesisir laut Desa Batu Belubang mengambil keputusan tepat untuk melihat masalah sebagai peluang dalam meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan, pencaharian. Saat ini terjadi pergeseran kehiatan ekonomi, baik sebagai nelayan tangkap, menjadi nelayan apung maupun aktivitas yang lain yang mengakibatkan rusaknya pesisir laut. Pengembangan potensi ekowisata pesisir laut Desa Batu Belubang membutuhkan penggerak untuk menumbuhkan berbagai kegiatan ekowisata, yang merupakan kebutuhan utama. Namun butuh sarana pendukung untuk kegiatan ekonomi dan sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal terbatas (Riyani, 2013)

Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Limbah Laut (Tambang)*, limbah laut yang berserak di pesisir laut salah satu menjadi tantangan yang nyata bagi pengembangan ekowisata di wilayah pesisir laut Desa Batu Belubang. Aktivitas tambang merupakan pekerjaan pengambilan biji timah. Dahulunya pengambilan timah dilakukan di daratan akan tetapi berkurangnya timah di daratan maka masyarakat beralih ke laut dengan beriring zaman dan masa moderen semakin meningkat sehingga masyarakat semakin tak terkendali. Aktivitas di lautan berbagai jenis seperti TI apung, kapal isap dan lain sebagainya. aktivitas inilah yang kemudian menghasilkan berbagai faktor kerusakan pesisir laut seperti kemunculan limbah minyak, sampah, kekeruhan air menjadi faktor tantangan dalam mewujudkan pengembangan kawasan ekowisata di wilayah pesisir lau Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah. Seperti halnya yang disampaikan Rusdi yang menyebutkan: *“limbah laut yang disebabkan oleh aktivitas tambang salah satu faktor tantangan dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan, karna dari aktivitas tambang tersebut memunculkan berbagai sampah akibat dari efek lingkungan yang terjadi. Karna gini lama kelamaan menjadi rusaknya pesisir laut. Nah masyarakat kita ni kalo kite bilang mereka pasti jawab e ini persoalan perut (makan). Padahal faktor itu akan mengakibatkan fatal, ngape ku bisa bilang fatal karna air laut kita rusak, sampah berkeliaran, ekosistem laut menjadi rubuh. Nah kire-kire enak dak di pandang. Pasti dak akan indah. Maka kalo kita ingin mengembangkan ekowisata pesisir laut harus pahami dulu kondisi laut yang kita punya. Ni lah kelak yang*

menjadi tantangan kami bagaimana nanti pesisir laut kita bersih, nyaman sehingga kita mampu menarik wisatawan berkunjung” (wawancara, 7 Juni 2022)

b. Pertambangan laut, pertambangan laut merupakan aktivitas pengambilan mineral yang relatif baru yang dilakukan di pesisir laut Desa Batu Belubang. Hal ini menjadi tantangan yang dapat memicu perubahan lingkungan yang saat ini dihadapi dalam pengembangan kawasan ekowisata di wilayah pesisir laut Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah. Penambangan timah lepas pantai tanpa dasar hukum, terumbu karang dengan jelas telah rusak, mencemari pantai, dan mengganggu perkembangan perikanan dan mengganggu sistem sosial. Potensi besar dalam jangka panjang akan habis, hanya untuk mengisi nafsu keuntungan yang sesaat. Efek samping dari adanya pertambangan laut ini maka menjadi sebuah ancaman dan tantangan yang dapat merusak bagian potensi alam khususnya pengembangan kawasan ekowisata di wilayah pesisir laut Desa Batu Belubang. Dua hal yang berbeda dalam pertambangan laut yaitu penambang ilegal dan penambang legal, dua sisi ini pada hakekatnya adalah dapat merusak lingkungan laut dan pesisir yang secara tidak langsung berdampak pada ekosistem laut. Bisa saja terjadi yang ilegal dapat bermitra kepada yang legal, sehingga mereka ikut juga dalam pertambangan laut. Hal ini tak dapat dipungkiri bahwa lama-kelamaan dapat merusak lingkungan laut dan pesisirnya. Sehingga menimbulkan sebuah dilema oleh pemerintah kita. Satu sisi sumber ekonomi adalah pertambangan namun sisi yang lain dapat merusak lingkungan yang berkelanjutan. Padahal sektor ekowisata tak kalah penting untuk di kembangkan dan dapat menjadi pendapatan daerah. Tetapi dengan adanya pertambangan timah laut ini menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan kawasan ekowisata di wilayah pesisir laut Desa Batu Belubang. Hal ini disampaikan Firmansyah yang menyebutkan: “tantangan yang mempengaruhi pengembangan kawasan ekowisata yaitu adanya tambang laut. Tambang yang legal maaf ngumong lah kita mereka punya dasar hukum e. Sedangkan yang ilegal bisa saja mereka bermitra kepada yang legal. Sehingga mereka ada kesempatan untuk ikut menambang. Pengaruh tambang laut ini sangat besar terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan dapat memunculkan berbagai faktor, terutama faktor sosial, berebut lahan, kemudian faktor turunnya mutu lingkungan seperti kerusakan yang terjadi di pesisir maupun di lautan. Terus ape yang nk kita lihat, keindahan pantai laut dak de agik yang menarik. Dan hal ini berpengaruh terhadap pengembangan ekowisata. Nah ini lah yang salah satu menjadi tantangan besar kami”(wawancara, 2 Juni 2022)

Hal ini tentu saja menjadi tantangan dan perlu dihadapi antara lain dengan melakukan dan meningkatkan promosi ekowisata berbasis wisata pesisir laut dan dapat

juga melakukan upaya-upaya pengemasan paket ekowisata yang berbasis wisata alam pesisir laut yang lebih menarik disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan dan pengunjung. Kemudian untuk persoalan infrastruktur tentu menjadi pekerjaan bersama dengan pemerintah, untuk segera membangun sarana dan prasarana yang mendukung industri desa ekowisata khususnya ekowisata Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, oleh sebab itu pengiat desa ekowisata harus menyiapkan diri sebaik mungkin dalam menghadapi tantangan pengembangan ekowisata di wilayah pesisir laut Desa Batu Belubang.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa dalam pengembangan kawasan ekowisata di wilayah pesisir laut Desa Batu Belubang memiliki berbagai tantangan yang harus di benah oleh stakeholders terkait. Agar pengembangan dan pengelolaan ekowisata bisa berjalan dengan baik yang akan menciptakan desain – desain ekowisata yang berkelanjutan. Mesti pengembangan ekowisata di area tambang tidak menutupi kemungkinan bahwa ekowisata pesisir laut dapat menumbuhkan ekonomi berbasis ekowisata. Memberikan peluang serta keuntungan bagi masyarakat lokal serta pemerintah daerah. Bila stakeholders dapat melaksanakan pengembangan ekowisata ini berjalan dengan baik maka harus adanya kerja sama antar pemangku kepentingan, dan tidak terjadi dilematis antar sesama, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya satu sisi, tetapi lebih banyak lagi sisi lain untuk mendapatkan sumber pendapatan daerah tersebut. Melalui jalur-jalur pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian mengenai “Ekowisata di Area Tambang: Tantangan Pengembangan Kawasan Ekowisata di Pesisir Laut Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah” yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan ekowisata di area tambang memberikan dampak kebaruaran serta strategi yang menghadirkan berbagai desain yang menarik untuk di kaji, akan tetapi akan melahirkan berbagai tantangan yang harus di selesaikan. Tantangan-tantangan tersebut menjelaskan bahwa dalam pengembangan kawasan ekowisata memiliki tantangan yang perlu kita hadapi sesuai potensi yang ada. Tantangan terbesar yang dimiliki wilayah ini yaitu merupakan kawasan ekowisata dengan gamblingnya di area pengembangan tersebut dapat dilihat bahwa aktivitas tambang laut masih berjalan aktif, sehingga beberapa kawasan laut dan pesisir terjadi kerusakan, sedangkan pada saat ini sebagian masyarakat masih memperjuangkan kebutuhan ekonomi melalui pengembangan kawasan ekowisata. Namun demikian dimana dalam pelaksanaan aktivitas pertambangan di sekitar kawasan ekowisata tersebut tidak terlepas dari ekologi politik tentang bagaimana konsistensi dan pengambilan kebijakan oleh pemerintah ternyata berpengaruh terhadap gerakan-gerakan lingkungan oleh masyarakat ekowisata menurut Rajendra Singh dan Paul Robbins, hal ini terkait tantangan yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan di pesisir laut yang cenderung merusak terhadap pengembangan kawasan ekowisata pemanfaatan sebagai pariwisata yang lebih menjaga kelestarian lingkungan.

Adanya ekologi politik yang memunculkan gerakan-gerakan masyarakat dalam memperjuangkan keutuhan kawasan pengembangan ekowisata terhadap munculnya aktivitas pertambangan laut dan pesisir yang mengakibatkan dilematis antar kebijakan, sehingga masyarakat perlu pengetahuan dalam menentukan potensi yang baik dalam menciptakan konsep-konsep yang elegan untuk proses pengembangan ekowisata yang lebih baik, entah itu melibatkan semua stakeholders untuk menciptakan berbagai konsep yang ditawarkan untuk menunjang keberhasilan ekowisata di tingkat desa. Agar potensi-potensi daerah dapat di lakukan untuk pengembangan ekowisata sesuai potensi yang ada, ekowisata berwawasan lingkungan, yang dapat memperhatikan proses berjalannya ekologi politik yang dilakukan aktor-aktor yang berperan dalam gerakan sosial baru datang dari berbagai latar belakang yang beragam yang secara sama-sama bergerak untuk kepentingan bersama. Sedangkan ekologi politik memainkan peran dalam melihat bagaimana

perubahan yang terjadi pada lingkungan dan kondisi ekologis memiliki korelasi yang kuat dengan sistem kebijakan (hirarki kekuasaan) oleh pemerintah daerah. Permasalahan-permasalahan mengenai kerusakan alam pesisir laut dan lingkungan tidak hanya bisa dijelaskan secara teknis. Lebih dari itu, ada pengaruh sosial-politik yang perlu diperhatikan dari dampak aktivitas pertambangan yang salah satunya adalah konsep pengembangan ekowisata di pesisir laut tersebut.

Disamping itu, peran pemerintah dalam perbedaan pendapat masyarakat terkait aktivitas pertambangan pesisir dan laut dalam hal ini sangatlah penting. Dimana pemerintah dari pihak desa sebagai mediasi masyarakat dan di pihak kecamatan sebagai pihak yang memimpin dari penyelesaian masalah perbedaan tersebut. hal ini dapat dilihat sebagai pengambilan keputusan dalam mewujudkan cita-cita bersama untuk pengembangan kawasan ekowisata pesisir dan laut Desa Batu Belubang. Namun disisi lain adanya aktivitas pertambangan yang menjadi sebuah tantangan dalam mewujudkan proses pengembangan kawasan ekowisata pesisir dan laut. Penyelesaian-penyelesaian masalah tersebut dapat di ukur dari berbagai bentuk-bentuk konsep pengembangan ekowisata yang ditawarkan oleh stakeholder yang terkait. Sehingga dapat menciptakan kebijakan yang akurat di daerah tersebut. adapun hasil yang diperoleh dari perbedaan pendapat tersebut yakni adanya pemberian kompensasi bagi masyarakat yang merasa dirugikan dari aktivitas pertambangan pesisir dan laut tersebut. sedangkan dari pihak kabupaten dan provinsi juga terkait perannya dalam perbedaan tersebut juga dominan yang mediasi dan pilihan-pilihan terkait kepada masyarakat sebagai solusi penyelesaian masalah yang dihadapi dalam menentukan konsep pengembangan ekowisata yang berkelanjutan dan dapat menguntungkan masyarakat lokal dan daerah tersebut.

Dilain sisi, untuk keberlanjutan pengembangan kawasan ekowisata yang telah dimasuki oleh adanya aktivitas pertambangan pesisir dan laut di Desa Batu Belubang tersebut. dari pihak pendesaan dan kecamatan sendiri ingin memfokuskan untuk sektor pengembangan ekowisata, yang dimana pengembangan ekowisata ini tidak semua desa memiliki pengembangan kawasan ekowisata apa lagi di wilayah pesisir dan laut yang menjadi fokus dari pengembangan kawasan ekowisata tersebut, sehingga ekowisata tersebut akan terus dikembangkan untuk kedepannya. Sedangkan terkait sektor pertambangannya, karena peran desa dan kecamatan minim dalam pertambangan, mereka berharap untuk adanya aktivitas pertambangan di pesisir dan laut di kawasan pengembangan ekowisata jika bisa jangan ada pertambangan pesisir dan laut yang dapat

merusak bibir pantai dan merusaknya keindahan air laut sehingga tidak elok dilihat, dan jika ada pun kalau bisa sekitar 1 mil dari bibir pesisir dan kalo bisa jangan ada pertambangan juga di laut di daerah kawasan ekowisata karena akan mengakibatkan ekosistem laut tak terkendali.

Berdasarkan pemaparan tersebut, persoalan pengembangan kawasan ekowisata yang bertentangan dengan adanya aktivitas pertambangan. Yang mengakibatkan rusaknya laut dan pesisir menjadi faktor dan tantangan yang berlaku di dalam pengembangan kawasan ekowisata pesisir dan laut di Desa Batu Belubang ini merupakan hal yang seharusnya diperhatikan agar kedepannya bagaimana baiknya aktivitas pertambangan dilakukan agar bisa berjalan beriringan dengan konsep ekowisata disekitarnya. Hal ini juga tentu saja harus disusun dengan melibatkan berbagai elemen-stakeholder agar selanjutnya tidak adanya kejadian serupa.

Saran

Terkait permasalahan pengembangan kawasan ekowisata di area tambang yang menimbulkan banyak konsep dan tantangan serta memunculkan banyak pernyataan dari berbagai dinas dan instansi. Dari pernyataan yang berbeda-beda dari instansi terkait permasalahan antara ekowisata dan pertambangan, setidaknya koordinasi dan komunikasi yang baik antar instansi dapat menyamakan persepsi dan meminimalisir tantangan dari tambang terhadap pengembangan kawasan ekowisata pesisir dan laut. Selain itu, sosialisasi terkait bagaimana implementasi suatu peraturan dilapangan juga sangat dilakukan dalam meminimalisir permasalahan yang sebenarnya sudah memiliki payung hukum yang jelas sehingga dapat memberikan ketegasan dalam menentukan kebijakan.

Namun tidak terbatasnya dari koordinasi yang baik dan sosialisasi terkait peraturan, pemerintah juga harus mengontrol jalannya implementasi dari peraturan. Sehingga aktivitas tambang pesisir dan laut yang dilakukan di sekitar pengembangan ekowisata yang tidak memberikan dampak bagi keduanya, terutama bagi ekowisata yang notabene baik cenderung berdampak dari aktivitas tambang di pesisir dan laut di sekitar wilayah pesisir laut Desa Batu belubang yang notabene tambang sendiri itu merusak, sehingga hal ini membutuhkan perhatian dan kepedulian tidak hanya dari pemerintah saja, melainkan dari seluruh elemen masyarakat. Agar menciptakan kawasan yang bermoral dan elegan sangatlah dibutuhkan stakeholder yang mampu bekerja sama dalam merencanakan pengembangan kawasan ekowisata di pesisir laut Desa Batu Belubang.

TENTANG PENULIS

Kevin Sabri

Lahir di Kota Pangkalpinang, kecamatan Girimaya, Pangkalpinang pada 11 November 1999. Anak ke 6 (Enam) dari 6 (Enam) bersaudara ini menempuh pendidikan dasar di kota Pangkalpinang dan Pendidikan menengah serta Pendidikan kejuruan. Dan kemudian ia melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Bangka Belitung dengan jurusan Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Serta aktif di berbagai organisasi kampus maupun di luar kampus. Kemudian ia merintis usaha warung kopi dengan nama warkop atok hulu-hilir di salah satu lokasi di kota pangkalpinang, dan aktivitas sehari – hari yang dilakukannya adalah menjadi seorang Guru di salah satu sekolah menengah yaitu di SMP YAPENKOS Kabupaten Bangka Tengah Desa Sampur.

Hal ini juga tidak kalah pentingnya ia juga seorang pencipta puisi serta mengikuti perlombaan di seluruh indonesia dengan lomba puisinya. Dan sudah melahirkan berbagai buku antologi puisi yang telah diterbitkannya. Ia anak yang gigih dan pantang menyerah. Sekali berjuang pantang tumbang. Tetapi yang membuat ia justru lemah yaitu ketika ingin menghadiri orang tua perempuannya untuk menghadiri wisuda hal itu justru tidak tercapai dikarenakan orang tuanya meninggalkan ia untuk selamanya dan tidak pernah kembali. Sehingga saat ini ia sedang merintis pulih dari kesedihan tersebut untuk berjuang lebih keras agar orang tuanya di akhirat bahagia dan tersenyum melihat keberhasilan anaknya dalam memperjuangkan pendidikannya di S2 yang akan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

a. Jurnal :

- Arianti, Desi, (2016). *Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian dan Keruangan Kota Bukittinggi (pendekatan analisis input output)*. Jurnal Pembangunan Wilayah dan kota. Vol. 12, No.4, Desember 2016.
- Asari, Ayu, dkk. (2018). *Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat di Desa Baho, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Ilmiah Platax. Vol. 6, No. 1, Januari 2018.
- Adrian, Krisna, dkk. (2021). *Analisis Dampak Aktivitas Proyek Tambang Timah di Perairan Laut Pulau Bangka Terhadap Hak Atas Pekerjaan Nelayan Traditional: Perspektif inclusive Citizenship*. Vol. 11, No. 02, November 2021.
- Adisukma, Dana, dkk. (2014). *Dampak Degradasi Lingkungan Terhadap Potensi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan di Delta Mahakam: Suatu Tinjauan*. Jurnal Wilayah dan Lingkungan. Vol. 2, No.1, April 2014.
- Bahiyah, C., Hidayat, W., Sudarti. (2018). *Strategi Pengembangan Pitensi Pariwisata di Pantai Duta Kabupaten Probolinggo*. Jurnal Ilmu Ekonomi, 95-103.
- Bambang, Pramudyanto, (2014). *Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di Wilayah Pesisir*. Jurnal Lingkar Widyaaiswara. Vol.1, No.4, Oktober-Desember 2014.
- Dewi Anggarani, dkk. (2020). *Tambang Pasir dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat di Pesisir Pantai*. Jurnal of social science, Vol.1, No.1 November 2020.
- Dahuri, Rokhimin. (2001). *Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jurnal Pesisir dan Laut, Vol. 17, No. 2 April 2001.
- Dedi, Gusman. (2012). *Diskursus Pengembangan Pariwisata Dalam Masyarakat*. Jurnal Kajian Budaya Universitas Udayana, Vol.1, No.1, Desember 2012.
- Erman, erwiza. (2010). *Aktor, Akses, dan Politik Lingkungan di Pertambangan Timah Bangka*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Edisi XXXVI/NO.2
- Fahrunnisa, dkk. (2015). *Dilema Agraria Pesisir Studi Kasus Masyarakat Pesisir Dusun Ujung Genteng Kabupaten Sukabumi*. Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol.03, No.03. hlm: 107-113.
- Fikri, Jamal. (2019). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir*. Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1.
- Ferdiana, Isna Wijayani, (2020). *Komunikasi Pariwisata Pertambangan Kabupaten Bangka, Mining Tourism Communication Of Bangka District*. Jurnal Inovasi. Vol.14, No.1.

- Fuquh Rahmat Shaleh dan Mukti Ali. (2021). *Pemilihan Jenis Kegiatan Wisata Dalam Pengembangan Ekowisata Pesisir Pantai Kutang Lamongan*, Jurnal Ilmu Perikanan, Vol.12, No.1.
- Harisson, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Hakim, Lukman Agus. (2018). Kajian Kebijakan Sumberdaya Alam Berbasis Pada Ekologi Politik. Jurnal Publik Administrasi, Vol. 4, No.2, Desember 2018.
- Husamah, dan Atok Miftachul Hudha. (2018). *Evaluasi Implementasi Prinsip Ekowisata Berbasis Masyarakat Dalam Pengelolaan Clungup Mangrove conservation Sumbermanjing wetan, Malang*. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Vol. 8, No. 1, April 2018.
- Ira Dillenia dan Luh Putu Ayu Savitri Chitra Kusuma. (2010). *Sumberdaya Arkeologi Laut untuk Pengembangan Ekowisata Bahari Di Indonesia: Tinjauan Konsep dan Studi Kasus*. Bogor: ikatan sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI)-Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI.
- Ibrahim, dkk. 2019. *Politik Ekologi dan Pelajaran dari kasus Timah Bangka Belitung*. Yogyakarta: Istana Media.
- Irma, Feberianty, (2017). *Strategi Pengembangan Wisata Pesisir Pantai: Studi Kasus Desa Batu Lima, Kuala Tambangan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan*. Jurnal Dinamika Maritim, Vol. 6, No.1, Agustus 2017.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta:Erlangga.
- Jeanne, Darc Noviyanti Manik. (2018). *Kebijakan Pertambangan Laut Timah Yang Berdampak Pada Lingkungan*. Jurnal Promin, Vol. 2, No.2.
- Katrina Jaha Walu dan Nanang Bagus. (2019). *Analisis Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata Kota Batu*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.8, No.3.
- Karlina, Bella. 2015. *Pengaruh Manajemen Fasilitas Terhadap Mutu Layanan Diklat di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industry (PPPPTK BMTI) Bandung*. Universitas Pendidikan Indonesia
- Megawandi, Yan. (2020). *Pembangunan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Pendekatan whole of Government*. Jurnal Widyaiswara Indonesia, Vol.1, No.2, Juni 2020.
- Made, Suryadi, (2014). *Pengembangan Wisata Alam Dalam Perspektif Otonomi Daerah dan Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan*. Jurnal Media Komunikasi. Vol. 15, No.2 Desember 2014.

- Mukti Ali dkk, (2020). *Strategi Pengembangan Ekowisata Bahari Pantai Utara Jawa Timur di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*. Jurnal Riset Perikanan dan Kelautan, Vol.2, No.2 Hlm. 238-248.
- Mandala, Harefa, (2020). *Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Penerimaan Daerah di Kabupaten Belitung*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik. Vol.11, No.1, Juni 2020.
- Masriana, (2019). *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (community based tourism) di Pantai Ide Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Mulyadi, Aras dkk, (2017). *Dampak Lingkungan Dari Pengembangan Ekowisata Bahari di Kawasan Konservasi Lamun Trikora, Bintan, Kepulauan Riau*. Jurnal Berkala Perikanan Terbuka, Vol. 45, No. 1, Februari 2017.
- M.Tumengkol, MSI, DRS. Selvie. (2013). *Potensi Dan Permasalahan Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan (Suatu Kajian Terhadap Sosiologi Pembangunan Wilayah Pesisir)*. Karya Ilmiah, Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Manado,2013.
- Nur, Rosyid. (2015). *Ekologi Politik dan Dinamika Sosio-Ekonomi di Dataran Tinggi Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah*. Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol.10, No.2, Desember 2015.
- Nurul Hasanah, dkk, (2018). *Politik Ekologi Ekowisata di Taman Wisata Alam Batu Putih Kelurahan Batu Putih Bawah*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1 Tahun 2018
- Nurul, Fahjri Chikmawati, (2013). *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Ekonomi Masyarakat Tradisional*. Jurnal Hukum, Vol.4, No.2.
- Nugroho, Iwan. (2011). *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Rudy Anarta, dkk. (2019). *Pengembangan Mining Tourism di Kawasan Pertambangan Sawahlunto*. Jurnal ilmu-ilmu sosial dan humaniora, Vol. 21, No.2, Tahun 2019.
- Resty Dwi Julianovi dan Irman Syahriar. (2021). *Tinjauan Yuridis Alih Fungsi Reklamasi Pasca Tambang Menjadi Obyek Wisata di Desa Loa Ulung Kabupaten Kutai Kartanegara*. Jurnal Legalitas. Vol.6, No.1.
- Rijal, Syamsu, dkk. (2020). *Strategi dan Potensi Pengembangan Ekowisata Rumbia Kabupaten Jeneponto*. Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 12, No. 1, 13 Juli 2020.

- Revi, Marta, (2016). *Karakteristik Wisatawan Kota Wisata Tambang Sawahlunto: Pendekatan Komunikasi Dalam Membangun Identitas Kota*. Prosiding Seminar Nasional Komunikasi. Universitas Andalas, 2016.
- Resdianto, Willem, (2018). *Pemanfaatan Ruang Pesisir Dan Laut Yang Berkeadilan The Utilization Of Coastal And Marine Of Justice*. Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 2, No.2, April 2018.
- Rahman, Bustomi dan Ibrahim. 2009. *Menyusun Proposal Penelitian*. Pangkalpinang: UBB Press.
- Robbins, Paul, 2012. *Political Ecology: Critical Introductions to Geography*. West Sussex: Wiley-Blackwell.
- Sunawan, (2019). *Kebijakan Pembangunan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan di Kabupaten Gunungkidul*. Jurnal Widya Pranata Hukum. Vol.1, No.2. Tahun 2019.
- Swastiwi, Anastasia Wiwik, dkk. (2017). *Lintas Sejarah Perdagangan Timah di Bangka-Belitung Abad 19-20*. Kepulauan Riau: Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau.
- Sabri, Kevin, dkk, (2019). *Analisis Peran Kepala Daerah Terhadap Perubahan Kompetensi Ekonomi Warga Pesisir Batu Belubang-Bangka Tengah*. Jurnal Dinamika Pemerintah, Vol.2, No.1 Januari 2019.
- Tanti Rismika dan Eko Priyo Purnomo, (2019). *Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Laut Akibat Pertambangan Timah Di Provinsi Bangka Belitung*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol.4, No.1.
- Verdinand Robertua Siahaan, 2020. *Politik Lingkungan Indonesia Teori dan Studi Kasus*. Jakarta: UKI Pres
- Varicela, Nesda. (2019). *Perbandingan Peran Pendapatan Asli Daerah Sektor Pertambangan Dan Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Universitas Bangka Belitung.
- Vinda Asparita, dkk. (2021). *Persepsi Masyarakat Dan Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Lahan Bekas Tambang Timah Sebagai Kampoeng Reklamasi Air Jangkang di desa Rinding Panjang Kabupaten Bangka*. Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Vol. 7, No.1, hlm 267-278.
- Wardhani,, Rulyanti susi dan Valerian, Devi. (2016). *Green Tourism Dalam Pengembangan Pariwisata di Bnagka Belitung*. Proseding Seminar Nasional INDOCOMPAC Universitas Bakrie Jakarta, 2-3 Mei 2016.
- Zulmiro, Pinto. (2015). *Kajian Perilaku Masyarakat Pesisir yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Pantai Kuwaru, Desa Poncorasi, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY)*. Jurnal Wilayah Dan Lingkungan. Vol.3, No.3 Desember 2015.

b. Sumber Internet :

- Ismi, Nopri. (2020). *Nelayan versus Tambang Timah, Akankah Berakhir di Bangka?* (<https://www.mongabay.co.id/2020/07/24/nelayan-versus-tambang-timah-akankah-berakhir-di-bangka/>) diakses pada 26 Januari 2021.
- Syari, Indara Ambalika. (2014). <http://www.mongabay.co.id/2015/07/29/opini-pulau-Bangka-meradang-karena-tambang/> yang di akses pada 28 Januari 2021.
- Normawati, K Mboto, (2020). *Menggagas Solusi Masalah Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut Dusun Lala*, <http://walhisulteng.com/menggagas-solusi-masalah-kerusakan-lingkungan-pesisir-dan-laut-dusun-lala/> diakses pada 6 Juli 2020.
- Rustian, Al Ansori. (2016). http://www.kompasiana.com/rustian/dilema-antara-pariwisata-penambangan-di-babel_57efd0c07897739931fbff60/diakses pada 2 oktober 2016.
- Ridha,(2019).<https://www.publicanews.com/berita/publicana/2019/02/05/26589/diskursus-ekologis.html>diakses pada 5 Februari 2019.
- Yusuf, Muhammad, (2021) <http://kkp.go.id/djprl/p4/artikel/31091-menteri-kelautan-dan-perikanan-resmikan-ekowisata-mangrove-apar-untuk-pelestarian-ekosistem/> diakses pada 4 Juni 2021.

c. Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara